

**EVALUASI SISTEM PROFIL DESA DAN KELURAHAN
(PRODESKEL) DI KANTOR PEMERINTAH DESA KAMPUNG
BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



Oleh :

NAMA : NURLISAI YULANDA
NPM : 220411063

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 9
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

SEKRETARIS


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|
| 1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si | (Pembimbing I) | () |
| 2. EMILLIA EMHARIS, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji I) | () |
| 3. RISVANDI, S.Pd.L., M.Si | (Anggota Penguji II) | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EVALUASI SISTEM PROFIL DESA DAN
KELURAHAN (PRODESKEL) DI KANTOR
PEMERINTAH DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA
NAMA : NURLISAI YULANDA
NPM : 220411063
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



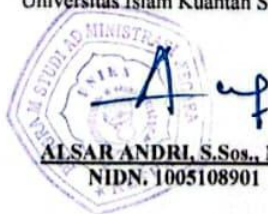
RIKA RAMADHANTI, S.Ip., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : NURLISAI YULANDA

NPM : 220411063

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 27 April 2026



NURLISAI YULANDA
NPM. 220411063

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa Ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat Ayah Ibuku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia.”
(Penulis)

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur "Alhamdulillah" penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengembal amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Salam dan Ibunda tercinta Rosmanita**, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis sehingga dapat mengecap pendidikan serta dapat menyaksikan keindahan dunia ini. Terima kasih juga telah membesarkan dan mendidik penulis dan juga sudah menjadi penyemangat terhebat dalam kehidupan penulis. Serta ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai tahap terselesaikannya skripsi ini.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



NURLISAI YULANDA
NPM. 220411063

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan (*yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur*) mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **“Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”**, yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah bagaimana sistem tersebut mendukung penyediaan data desa yang akurat, mutakhir, dan relevan. Dengan melakukan evaluasi ini, berbagai aspek penting seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi Prodeskel dievaluasi.

Manfaat penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data Prodeskel. Melalui hasil evaluasi, pemerintah desa dapat mengetahui kelemahan dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perbaikan sistem agar lebih akurat, tepat sasaran, dan mendukung perencanaan pembangunan desa.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam

pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituil berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I, sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah serta memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing II yang telah mengacc judul penelitian dan transkrip nilai sebagai salah satu syarat untuk penelitian ini dikonfrehensifkan sekaligus mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Desriadi, S.Sos, M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan serta motivasi penulis dalam kesuksesan penulisan penelitian ini.
6. Bapak – bapak dan Ibu – ibu Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik memberikan pengetahuan kepada penulis.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
8. Untukmu sahabat-sahabat karibku yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, nasehat serta perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar untuk penulis.
9. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemerintahan desa dan masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal 'Alamin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teluk Kuantan, 27 April 2026

Penulis



NURLISAI YULANDA
NPM. 220411063

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB 1 <u>P</u> ENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II <u>L</u> ANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori.....	10

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....	10
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan	14
2.1.3 Teori/Konsep Pembangunan	18
2.1.4 Teori/Konsep <i>Good Governance</i>	21
2.1.5 Teori/Konsep Keuangan Evaluasi.....	24
2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Desa.....	27
2.1.7 Teori/Konsep Sistem Profil Desa dan Kelurahan	33
2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
2.3 Hipotesis.....	36
2.4 Definisi Operasional.....	37
2.4.1 Efektivitas	37
2.4.2 Efisiensi.....	37
2.4.3 Kecukupan.....	37
2.4.4 Perataan	37
2.4.5 Responsivitas	38
2.4.6 Ketepatan.....	38
2.5 Operasional Variabel.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Informan.....	40

3.3 Sumber Data.....	41
3.3.1 Data Primer	41
3.3.2 Data Sekunder	41
3.4 Fokus Penelitian	42
3.5 Lokasi Penelitian.....	42
3.6 Metode Pengumpulan Data	42
3.6.1 Observasi.....	42
3.6.2 Wawancara.....	43
3.6.3 Dokumentasi	43
3.6.4 Triangulasi.....	43
3.7 Analisis Data	43
3.7.1 <i>Data Reduction</i> (Reduksi data)	44
3.7.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	44
3.7.3 <i>Conclusion Drawing</i> (Pengarikan Kesimpulan)	44
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	46
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi	46
4.1.2 Letak Geografis Desa Kampung Baru Sentajo	46
4.2 Struktur Organisasi Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo.....	50

4.3 Tugas dan Fungsi	51
4.3.1 Kepala Desa	51
4.3.2 Sekretaris Desa.....	52
4.3.3 Operator Prodeskel.....	52
4.3.4 Kasi Kesejahteraan.....	54
4.3.5 Badan Permusyawaraan Desa	55
BAB VI PENUTUP.....	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I. 1	: Deskripsi Potensi Sumber Daya Alam Desa Kampung Baru Sentajo 2025.....	4
I. 2	: Laporan Pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo 2023-2025	5
I. 3	: Tampilan Data Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo 2023-2025	5
II. 1	: Operasional Variabel Evaluasi Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya	39
III. 1	: Informan Penelitian Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya	40
III. 2	: Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Tampilan Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo	33
Gambar II.2 : Kerangka Pemikiran Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Daftar Wawancara Penelitian Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo kecamatan Sentajo Raya	115
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo kecamatan Sentajo Raya..	127
Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 067/Kpts/FIS/UNIKS/X/2022tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.....	131
Lampiran 4 : Surat Balasan Riset Penelitian Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo kecamatan Sentajo Raya	132
Lampiran 5 : Catatan Bimbingan Proposal Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo	133
Lampiran 6 : Catatan Bimbingan Skripsi Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo	135
Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian.....	137
Lampiran 8 : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian	138
Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup	139

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) DI KANTOR PEMERINTAH DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA

**NURLISAI YULANDA
NPM. 220411063**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling dan snowball sampling*, dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan hasil evaluasi sistem profil desa dan kelurahan (Prodeskel) di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya dinilai belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Prodeskel.

ABSTRACT

EVALUATION OF VILLAGE AND SUB-DISTRICT PROFILE SYSTEM AT THE VILLAGE GOVERNMENT OFFICE OF KAMPUNG BARU SENTAJO, SENTAJO RAYA DISTRICT

**NURLISAI YULANDA
NPM. 220411063**

This study was conducted at the Kampung Baru Sentajo Village Government Office in Sentajo Raya District. The problem addressed in this study concerns the evaluation of the Village and Urban Village Profile System (Prodeskel) at the Kampung Baru Sentajo Village Government Office. The study aimed to assess the evaluation of Prodeskel at the Kampung Baru Sentajo Village Government Office. A qualitative research approach was employed. The sampling techniques used were purposive sampling and snowball sampling, involving a total of eight informants. Data collection methods included interviews, observation, documentation review, and triangulation. Based on the evaluation results, the village and urban village profile system (Prodeskel) at the Kampung Baru Sentajo Village Government Office in Sentajo Raya District is considered not to be functioning effectively.

Keywords : Evaluation, Prodeskel.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan daerah harus dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini dilakukan agar mereka dapat membangun landasan yang kuat untuk pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih praktis, Undang-Undang Otonomi Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, yang telah diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Oleh karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa harus memperhatikan pengambilan keputusan dan pembangunan desa karena pembangunan desa dapat memangkas jarak antara kehidupan kota dan desa sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan membantu kemajuan nasional. Desa diharapkan dapat berkembang secara mandiri melalui program-program yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mengembangkan potensi mereka.

Untuk membantu pembangunan desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan data yang memberikan gambaran mendalam tentang karakteristik desa dan kelurahan. Data tersebut diproses dengan suatu sistem yang di kenal dengan Profil Desa dan Kelurahan

atau PRODESKEL (selanjutnya disingkat dengan Prodeskel). Sistem ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berbasis web, yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data desa dan kelurahan. Prodeskel ini didukung dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 86 : “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

Prodeskel juga diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Prodeskel yang bertujuan dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Selain itu, data prodeskel perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada.

Prodeskel terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Data dasar keluarga digunakan untuk data dasar perhitungan perkembangan kualitas manusia Indonesia. Kemudian potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana.

Pada dasarnya, ketersediaan data yang benar dan akuntabel sangat berdampak pada perencanaan program yang ada di desa. Namun, fakta bahwa publikasi data desa dan kelurahan yang dibuat oleh berbagai lembaga seringkali tidak akurat, berbeda-beda, dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya pemanfaatan aplikasi dengan baik sehingga sosialisasi dan pelatihan pemerintah tidak diterapkan dengan baik.

Evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses menilai sesuatu. Evaluasi juga bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, controlling dan evaluasi. Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan data untuk menentukan seberapa besar, apa, dan bagaimana program dapat mencapai tujuan. Evaluasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan menilai fenomena serta aplikasi ilmu pengetahuan.

Kecamatan Sentajo Raya merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai. Kecamatan sentajo raya memiliki luas 145,70 km² dan terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Diantara 14 desa tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di desa Kampung Baru Sentajo.

Secara geografis, Desa Kampung Baru Sentajo berada di lokasi strategis di jalur Lintas Teluk Kuantan-Rengat. Desa ini terhubung langsung dengan Desa Benai Kecil dibagian utara dan timur, Desa Pulau Kopung dibagian selatan, dan Desa Koto Sentajo dibagian barat. Desa Kampung Baru Sentajo mempunyai luas wilayah 547,09 Ha, yang terdiri dari 2 kelompok pemukiman yaitu Kampung Baru Luar dan Kampung Baru Dalam. Dua kelompok ini memiliki ciri khasnya masing masing, pada Kampung Baru Dalam terdiri dari sawah dan perkebunan lainnya, sementara pada kelompok Kampung Baru Luar terdiri dari pemukiman

warga yang ramai. Kondisi Topografi Desa Kampung Baru Sentajo didominasi dataran rendah. Suhu udara di Desa Kampung Baru Sentajo sekitar 29,00 derajat Celcius.

Tabel I.1 : Deskripsi Potensi Sumber Daya Alam Desa Kampung Baru Sentajo 2025

No	Potensi	Jenis	Uraian	Luas	Hasil
1.	Tanah Sawah	Sawah	Padi	10 Ha	25 Ton
			Lahan Kosong	7 Ha	-
2.	Tanah Kering	Ladang	Sawit	10 Ha	15 Ton
			Cabe	5 Ha	2 Ton
			Jeruk	4 Ha	3 Ton
			Kacang	1 Ha	500 kg
		Pemukiman	Hunian	86 Ha	-
		Pekarangan	Lahan Terbuka	10 Ha	-
3.	Tanah Basah	Tanah Rawa	Sawit	5 Ha	7.5 Ton
			Lahan Kosong	5 Ha	-
4.	Tanah Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Sawit	100 Ha	150 Ton
			Karet	80 Ha	7 Ton
		Perkebunan Swasta	Jagung	3 Ha	8 Ton
			Semangka	3 Ha	30 Ton
			Durian	2 Ha	8 Ton
			manggis	2 Ha	5 Ton
5.	Tanah Fasilitas Umum	Tanah Kas Desa	Sawit	7 Ha	8,5 Ton
		Lapangan Olahraga	-	1 Ha	-
		Kantor Pemerintah	-	0,5 Ha	-
		Tempat Pemakaman	-	3,59 Ha	-
		Bangunan Sekolah	-	5 Ha	-
		Pertokoan	-	4 Ha	-
		Jalan	-	14 Ha	-
		Usaha Perikanan	-	20 Ha	30 Ton

Sumber : Kantor Desa Kampung Baru Sentajo 2025

Tabel I.2 : Laporan Pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo 2023-2025

No	Tahun	Jenis Pembangunan
1	2023	Pembangunan Semenisasi Dusun Batang Tonga RT 09
2	2024	Pembangunan Semenisasi Dusun Tanah Ponggal RT 04
		Pembangunan Semenisasi Dusun Batang Tonga RT 10
3	2025	Pembangunan Semenisasi Dusun Batang Tonga RT 09
		Pembangunan Semenisasi RT 04

Sumber : Kantor Desa Kampung Baru Sentajo 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Desa Kampung Baru Sentajo memiliki karakteristik potensi alam yang beragam serta perkembangan pembangunan yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Namun, potensi alam yang beragam tersebut masih ditemukan lahan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu desa ini memerlukan dukungan sistem data yang kuat, khususnya untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), laporan kinerja, serta penentuan prioritas program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Ketersediaan data yang akurat melalui Prodeskel sangat diperlukan untuk memastikan arah pembangunan desa berjalan sesuai kondisi realistik di lapangan.

Tabel I.3 : Laporan Data Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo 2023-2025

No	Tahun	Temuan Pada Entry Data Prodeskel
1	2023	Ketidaklengkapan data pada item mata pencaharian masyarakat
		Ketidaklengkapan data pada item rasio pendidikan
		Ketidaklengkapan data pada item anggaran.
		Ketidaklengkapan data pada item jumlah RT/RW
2	2024	Ketidaklengkapan data pada item mata pencaharian masyarakat
		Ketidaklengkapan data pada item jumlah RT/RW
3	2025	Ketidaklengkapan data pada item mata pencaharian masyarakat
		Ketidaklengkapan data pada item jumlah RT/RW

Sumber : Kantor Desa kampung Baru Sentajo 2025

Berdasarkan data dan observasi peneliti, Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo dapat diakses melalui <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>. Kemudian ketika dilakukan pengamatan, peneliti menemukan bahwa pemanfaatan Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo belum berjalan optimal. Beberapa masalah yang muncul meliputi belum terintegrasinya seluruh elemen data, kurangnya kemampuan aparatur dalam penginputan dan pembaruan data, serta hambatan lain seperti pertukaran tenaga kerja (operator) di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo. Dengan adanya fenomena diatas maka penggunaan Prodeskel kurang dimanfaatkan dengan baik, sehingga perlu adanya pelatihan baru untuk tenaga kerja baru.

Fakta tersebut menggambarkan adanya kesenjangan pemanfaatan antara regulasi yang mengatur Prodeskel dan praktik pelaksanaannya di tingkat desa. Padahal, UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa harus mengelola kewenangannya dengan pendekatan *data-driven governance*, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 mengharuskan desa melakukan penyusunan, pembaruan, serta pendayagunaan informasi profil desa secara sistematis, berkelanjutan, dan terstruktur. Jika sistem data tidak berjalan optimal, maka seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan akan mengalami hambatan signifikan.

Disisi lain evaluasi pemanfaatan Prodeskel di desa Kampung Baru Sentajo masih belum diteliti secara mendalam, oleh karena itu evaluasi terhadap

pemanfaatan Prodeskel di Kampung Baru Sentajo penting dilakukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa depan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pemanfaatan Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo telah berjalan sesuai dengan pedoman dan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya melihat aspek teknis dalam pengisian data, tetapi juga meninjau aspek kelembagaan, kapasitas aparatur desa, serta pemanfaatan hasil dari data Prodeskel desa.

Di tengah semangat pemerintah untuk membangun dari pinggiran, pembangunan berbasis data menjadi suatu keniscayaan. Oleh sebab itu, penggunaan prodeskel menjadi barometer keberhasilan desa dalam menyusun arah pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Harapan besar juga terletak pada bagaimana data yang telah dihimpun dalam prodeskel tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi basis dalam pengambilan keputusan strategis desa.

Dalam konteks lokal Kampung Baru Sentajo, keberhasilan Prodeskel akan sangat tergantung pada kesiapan aparatur desa, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta partisipasi masyarakat. Evaluasi terhadap seluruh aspek ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi Prodeskel. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan, baik dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berbasis data maupun dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Evaluasi Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam evaluasi Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya.

Adapun manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua kategori :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori dari hasil penilaian Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, serta memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terkait evaluasi Prodeskel, terutama dalam aspek pengelolaan data.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo penelitian ini memberikan gambaran evaluasi Prodeskel yang telah di implementasikan.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat Desa penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai peran Prodeskel.

1.4.2.3 Bagi Lembaga Pendidikan kajian ini dapat dijadikan sumber ajar empiris dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran pada Program Studi Administrasi Negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Ilmu administrasi dipahami sebagai kajian tentang proses, struktur, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap konteks lokal-nasional (Dwiyanto, 2021). Kata administrasi yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (latin : ad = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata, administrasi berarti memberikan pelayanan kepada mereka. (Revida, 2020).

Menurut Woodrow Wilson administrasi negara merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan negara. Administrasi negara adalah proses pelaksanaan kebijakan pemerintah secara efisien dan rasional. Konsep ini menegaskan pemisahan antara ranah politik dan administrasi, di mana politik bertugas menetapkan kebijakan, sedangkan administrasi bertugas menjalankan kebijakan tersebut. Pandangan Wilson menjadi dasar pembentukan ilmu administrasi negara modern. (Tangkilisan, 2020).

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. (Syafiie, 2019).

Sementara, pengertian lain administrasi sendiri dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas.

2.1.1.1 Administrasi dalam arti sempit yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.

2.1.1.2 Administrasi dalam arti luas adalah proses kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. (Kacaribu, 2020).

Administrasi juga didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama. (Rahman, 2017).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo administrasi negara mencakup keseluruhan kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi negara tidak hanya mencakup birokrasi, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik.

Dengan demikian, administrasi negara merupakan aktivitas yang bersifat kompleks dan dinamis. Administrasi negara tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga melibatkan nilai, etika, dan aspek sosial. Administrasi negara adalah seluruh proses yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan publik. (Kencana, 2022).

Administrasi negara tidak lagi hanya berbicara tentang kerja birokrasi secara internal, tetapi juga bagaimana proses pemerintahan dapat diketahui, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan transparansi, pemerintah mencegah praktik korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. (Kurniawan, 2017).

Pendapat lain memandang administrasi negara sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan hukum untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Konsep ini menempatkan administrasi negara dalam kerangka *legal-formal*, di mana setiap aktivitas pemerintahan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah. administrasi negara tidak semata-mata kegiatan teknis, tetapi merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan nasional. (Tjandra, 2019).

Selanjutnya pandangan yang sama, administrasi negara diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mencukupi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Akuntabilitas menjadi pilar utama, karena setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, maupun hukum. Dengan demikian, administrasi negara berperan sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan publik, memastikan efektivitas penyelenggaraan negara, dan mengarahkan aparturnya kepada praktik pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Rakhmat, 2018).

Administrasi negara tidak hanya sekadar mengikuti prosedur birokrasi, tetapi juga mengutamakan profesionalitas aparatur, koordinasi antarinstansi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Profesionalitas aparatur menjadi unsur kunci, karena kualitas sumber daya manusia pemerintah menentukan efektivitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi publik secara akuntabel dan berkeadilan. (Zein & Septiani, 2019).

Administrasi negara juga merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan nasional secara terencana melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang sistematis. Administrasi negara berfungsi sebagai alat manajemen pembangunan yang menghubungkan tujuan negara dengan implementasi kebijakan, memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan sesuai prioritas nasional. (Tjokroamidjojo, 2017).

Administrasi negara berperan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat diterjemahkan secara operasional melalui mekanisme birokrasi yang efektif, koordinasi antar-lembaga, serta penggunaan sumber daya yang tepat sasaran. Dengan demikian, administrasi negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil nyata di masyarakat, sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih terukur, inklusif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi sektor sosial maupun ekonomi. (Wahab, 2022).

Administrasi negara juga dipahami sebagai instrumen strategis dalam kerangka pembangunan nasional yang berperan mengarahkan intervensi pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan wilayah, serta menata sektor publik melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan perencanaan pembangunan yang terpadu. Administrasi negara bekerja sebagai mekanisme yang memastikan kebijakan pembangunan dilaksanakan secara sistematis dan terukur, termasuk melalui pengalokasian anggaran, pengaturan investasi, serta penciptaan iklim institusional yang mendukung pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah. (Kuncoro, 2018).

Dari berbagai pandangan diatas maka administrasi negara pada dasarnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur bagaimana negara mengelola sumber daya publik, melaksanakan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme yang terencana. Administrasi negara juga dipahami sebagai proses birokratis yang memiliki struktur, aturan, dan prosedur formal untuk menciptakan ketertiban, administrasi negara juga dikenal sebagai instrumen pembangunan, penyedia layanan publik, serta ruang interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan publik melalui kebijakan yang efektif.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan yang terus dipakai sampai sekarang ialah konsep William N. Dunn. Kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian pilihan yang saling terkait oleh institusi/pejabat pemerintah, termasuk keputusan, tindakan, dan program yang bertujuan menyelesaikan masalah publik. (Dunn, 2018).

Sementara itu kebijakan juga dipahami sebagai rangkaian keputusan yang dirumuskan pemerintah melalui proses administratif dan politik yang terstruktur untuk menjawab persoalan masyarakat secara sistematis. Penetapan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis masalah, perumusan alternatif, serta mekanisme pelaksanaan yang terukur sehingga mampu menghasilkan tindakan yang efektif. (Tahir, 2020).

Ahli lain memandang kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis berbagai sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik secara efektif. Kebijakan publik tidak hanya menjadi rumusan keputusan, tetapi juga merupakan instrumen administratif yang menghubungkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik dipahami sebagai proses yang mengintegrasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi guna memastikan bahwa sumber daya negara dialokasikan secara tepat untuk mengatasi masalah publik. (Pasolong, 2019).

Selanjutnya, kebijakan dipahami sebagai kerangka tindakan yang dirancang pemerintah dalam kerangka manajemen publik modern dengan menempatkan profesionalitas birokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan disusun melalui proses yang terstruktur, rasional, dan berorientasi pada hasil sehingga setiap keputusan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Sedarmayanti, 2019).

Disisi lain kebijakan menekankan pentingnya mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis agar setiap tindakan pemerintah dapat

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan publik secara tepat. Dengan demikian, kebijakan publik bukan sekadar instrumen formal, tetapi juga alat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. (Said, 2016).

Penjelasan lain juga menegaskan kebijakan merupakan keputusan atau ketetapan yang dibuat pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik secara terarah dan terukur. Penekanan utamanya ialah bahwa kebijakan tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan, tetapi sebagai proses yang terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari perumusan masalah hingga penilaian dampaknya terhadap masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, tetapi mekanisme pemecahan masalah yang melibatkan proses berkelanjutan dari identifikasi hingga evaluasi untuk memastikan tujuan publik tercapai secara optimal. (Zuleha, 2020).

Makna lain dari kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Penekanannya terletak pada ide bahwa kebijakan tidak selalu berupa tindakan yang tampak, tetapi juga dapat berupa keputusan untuk tidak mengambil tindakan selama pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan rasional, kepentingan publik, dan tujuan yang telah ditetapkan. (Kasaefulloh, 2021).

Kebijakan publik juga dipandang sebagai suatu proses yang mencakup analisis masalah, perumusan alternatif, pelaksanaan, dan evaluasi, yang keseluruhannya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan publik secara sistematis. (Sriyani, 2020).

Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian langkah atau keputusan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan ilmiah, analitis, dan berbasis data. Dalam konteks Prodeskel, prinsip ini relevan karena sistem ini memerlukan pengelolaan data desa yang terstruktur dan terpercaya, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis bukti. (Sutaryo, 2019).

Dari pandangan diatas, Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai dokumen formal yang berisi tujuan dan alat kebijakan, tetapi juga sebagai proses dinamis yang lahir dari interaksi para aktor politik, birokrasi, masyarakat, dan konteks institusional. Para ahli menekankan bahwa kebijakan selalu memiliki dimensi objektif yakni isi kebijakan, struktur aturan, serta instrumen yang digunakan dan dimensi subjektif berupa persepsi, interpretasi, dan dukungan publik yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya.

Kebijakan juga dapat disimpulkan sebagai serangkaian keputusan pemerintah yang dirancang secara terencana dan sistematis untuk merespons kebutuhan masyarakat, dengan menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil. Kebijakan ini melibatkan proses analisis data yang ilmiah dan berbasis bukti, partisipasi masyarakat, serta tata kelola birokrasi yang profesional, sehingga setiap tindakan pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Dalam konteks Prodeskel, prinsip-prinsip tersebut relevan karena sistem ini berfungsi sebagai instrumen pengolahan data desa yang mendukung

perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan desa secara tepat sasaran dan terukur. maka dapat disimpulkan kebijakan merupakan rangkaian keputusan, strategi, serta tindakan terencana yang disusun pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui pemilihan tujuan, instrumen, dan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur.

Dalam konteks praktik, kebijakan juga hadir dalam tindakan sehari-hari para pelaksana, dengan demikian, tujuan utama kebijakan adalah menghasilkan solusi yang efektif bagi kepentingan masyarakat, mengatur sumber daya secara adil, menciptakan layanan publik yang responsif, serta memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh publik. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan kombinasi antara rancangan strategis, instrumen teknis, proses politik, dan praktik sosial yang bersama-sama diarahkan untuk mencapai perubahan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2.1.3 Teori/Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan dalam konteks Indonesia berkembang dari pendekatan ekonomi, sosial, kelembagaan, tata kelola, hingga pemberdayaan masyarakat. Pembangunan merupakan rangkaian intervensi kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan menata sektor publik melalui instrumen fiskal, regulasi, serta perencanaan yang sistematis. Dengan demikian, pembangunan dipahami sebagai proses terarah yang mengintegrasikan kebijakan makroekonomi,

tata kelola publik, dan strategi pemerataan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (Kuncoro, 2018).

Pandangan lain pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi dipahami sebagai kegiatan strategis yang diarahkan untuk penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pengembangan inovasi yang mampu mendorong efisiensi dan produktivitas masyarakat, sehingga proses pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, memperluas peluang usaha, serta menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan masa depan. (Irawan, 2020).

Pembangunan merupakan proses yang dijalankan secara terencana oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan tata kelola pemerintahan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh inovasi dan pemberdayaan potensi lokal. Ini menekankan pentingnya memanfaatkan kekuatan dan karakteristik khas wilayah sebagai modal utama pembangunan, sehingga setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan, keberlanjutan, dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. (Nurkholis, 2020).

Pembangunan dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kemajuan sosial, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kerja sama lintas-aktor ini dipandang sebagai kunci

keberhasilan pembangunan karena memungkinkan integrasi sumber daya, teknologi, dan kapasitas lokal sehingga setiap program lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menciptakan dampak jangka panjang. (Setiawan, 2023).

Selanjutnya pembangunan yang baik, memiliki peran kepemimpinan dalam menggerakkan aparatur dan membangun sinergi lintas sektor untuk efektivitas pembangunan. Pemimpin harus berperan sebagai dinamisator yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. (Yunus & Rahman, 2019).

Pembangunan dipahami sebagai proses administratif yang sistematis dan terstruktur, di mana setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya. Hal ini berarti pentingnya penggunaan informasi yang valid untuk menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber daya secara tepat, serta memantau capaian hasil pembangunan. (Nursinta, 2019).

Pembangunan juga dikenal sebagai proses perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan melalui koordinasi antarorganisasi, efisiensi sumber daya, dan mekanisme monitoring berbasis data. Dalam perspektif ini, data yang valid seperti data Prodeskel menjadi instrumen penting dalam menetapkan prioritas pembangunan, merumuskan program yang tepat sasaran, serta melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan desa. (Hariawan, 2020).

Selain itu, pembangunan desa harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, mereka tidak hanya menjadi objek penerima manfaat program,

tetapi juga pelaku aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, sehingga aparaturnya harus memperhatikan data masyarakat dengan baik untuk menunjang pembangunan sesuai kebutuhan. (Suryana & Harahap, 2020).

Pembangunan desa dipahami sebagai proses penguatan governance lokal yang menuntut kemampuan pemerintah desa dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya, melakukan koordinasi lintas lembaga, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program pembangunan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran atau program, tetapi juga pada kemampuan institusi desa dalam menjalankan fungsi manajerial. (Sumaryana, 2018).

Berbagai pandangan diatas menunjukkan bahwa pembangunan, khususnya di tingkat desa, merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada penguatan tata kelola melalui perencanaan yang sistematis, penggunaan data yang akurat, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Pembangunan dipandang sebagai perubahan struktural yang menuntut partisipasi aktif masyarakat, keadilan dalam distribusi manfaat, kemandirian dalam memanfaatkan potensi lokal serta menjalankan evaluasi berbasis indikator objektif agar pembangunan dapat berlangsung inklusif, berkelanjutan.

2.1.4 Teori/Konsep *Good Governance*

Secara umum *good governance* dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang ideal apabila dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, supremasi

hukum, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Tata kelola yang baik harus dibangun melalui pemisahan fungsi yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta manajemen risiko yang dilakukan secara bertanggung jawab agar organisasi mampu menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan kinerja. (Suriadi, 2025).

Good governance diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, yaitu kemampuan institusi publik membaca kebutuhan masyarakat dan menindaklanjutinya secara cepat dan tepat. Kebijakan yang dihasilkan harus berbasis data sehingga keputusan yang dibuat tidak hanya mengikuti intuisi, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih demokratis, inklusif, dan efektif. (Natalia, 2022).

Pandangan lain memandang *good governance* sebagai tata kelola negara yang berlandaskan prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar legal. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bekerja sesuai koridor hukum, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. (Asshiddiqie, 2021).

Good governance juga diartikan sebagai sebuah hasil dari proses pembenahan birokrasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, di mana struktur, prosedur, serta budaya kerja aparatur diperbaiki untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang efisien dan profesional. (Zauhar, 2015).

Good governance merupakan suatu bentuk upaya membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, pemerintah harus mampu membaca dinamika kebutuhan masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang responsif, untuk itulah data desa dalam Prodeskel sangat berpengaruh dalam membuat suatu keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan di masa mendatang. (Mulyadi, 2018).

Pandangan lebih mendalam mengenai *good governance* dipahami sebagai mekanisme pengelolaan pemerintahan yang menekankan keakuratan data, pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta keterbukaan dalam penyajian informasi publik agar masyarakat dapat mengakses dan mengawasi proses pembangunan secara jelas.

Konsep ini menuntut pemerintah memiliki kualitas data dasar yang lengkap, valid, dan mudah diakses, karena data merupakan fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip tersebut sejalan dengan tujuan Prodeskel yang menyediakan profil desa secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. (Indriyani, 2016).

Sementara itu *good governance* dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang menuntut kepastian prosedur, konsistensi dalam setiap aspek administrasi, serta dokumentasi data yang akurat sebagai dasar pengelolaan organisasi publik. Efektivitas pemerintahan desa hanya dapat tercapai apabila sistem informasi

dikelola secara rapi, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data yang tidak valid akan melemahkan proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Pandangan ini sangat relevan dengan peran Prodeskel yang menyediakan data profil desa secara menyeluruh, sehingga menjadi fondasi penting bagi desa untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. (Hermansyah, 2017).

Selain itu, *good governance* bertumpu pada partisipasi warga, penguatan kelembagaan lokal, dan keterbukaan informasi pembangunan desa. Akses masyarakat pada data dan dokumen desa merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik, sehingga penyediaan data melalui Prodeskel menjadi elemen penting praktik tata kelola yang baik. (Komariah, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, kepastian prosedur, partisipasi, dan pengelolaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.

2.1.5 Teori/Konsep Keuangan Evaluasi

Secara bahasa, istilah evaluasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *evaluation*, yang berakar dari kata Latin *valere* yang berarti nilai, kekuatan, atau layak. Dengan demikian, secara etimologis evaluasi berarti proses memberi nilai, menilai, atau menentukan kualitas suatu objek, kegiatan, program, atau kinerja. Evaluasi secara bahasa mengacu pada kegiatan menimbang, mengukur, atau memberikan pertimbangan terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu untuk mengetahui sejauh mana nilai atau kualitasnya.

Evaluasi dipahami sebagai prosedur ilmiah yang dirancang untuk menilai sejauh mana tujuan suatu program telah tercapai serta menilai efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui langkah-langkah sistematis yang mencakup perencanaan pengukuran, pengumpulan data, analisis, dan penafsiran hasil. (Sudjana, 2017).

Pendapat lain memandang evaluasi sebagai model atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menilai input, proses, output, dan outcome suatu program secara sistemik dan berkesinambungan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menilai bagaimana sebuah program direncanakan, dijalankan, dan memberikan dampak bagi sasaran. (Wirawan, 2016).

Evaluasi dalam konteks sektor publik merupakan alat sistematis yang digunakan untuk mengukur kinerja program pemerintah berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan nilai manfaat. Evaluasi diposisikan sebagai komponen penting dalam pengelolaan keuangan dan kinerja instansi publik, karena berfungsi memastikan bahwa setiap program pemerintah memberikan hasil yang sepadan dengan sumber daya yang digunakan. (Mardiasmo, 2016).

Lebih lanjut, evaluasi dipandang sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi bukan hanya kegiatan mengukur hasil, tetapi juga menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, efektivitas, serta kelayakan program secara menyeluruh sehingga dapat digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan, dan pengembangan program ke tahap berikutnya. (Divayana, 2018).

Pandangan lain dari definisi evaluasi dipahami sebagai alat reflektif untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan berdampak jangka panjang. Evaluasi berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap adaptif, efektif, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan sesuai harapan masyarakat. (Abdullah, 2019).

Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis. Proses ini memungkinkan peneliti atau pengelola program memperoleh gambaran yang akurat mengenai sejauh mana tujuan program tercapai, kendala yang muncul, serta aspek yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai hasil, tetapi juga memberikan dasar informasi yang sah untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindak lanjut yang lebih tepat sasaran. (Saepudin, 2015).

Dalam kajian kebijakan publik, evaluasi kebijakan dipahami sebagai upaya sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan normatif maupun tujuan empiris yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan teknis kebijakan, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara kebijakan, konteks sosial, dan kebutuhan masyarakat. (Kadji, 2016).

Menurut William Dunn Indikator evaluasi itu sendiri dikembangkan menjadi enam indikator evaluasi yaitu:

2.1.5.1 Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakannya tindakan.

2.1.5.2 Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas.

2.1.5.3 Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan.

2.1.5.4 Perataan, berkenaan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

2.1.5.5 Responsivitas, berkenaan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

2.1.5.6 Ketepatan, berkenaan pada nilai atau harga diri dari tujuan sebuah program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi suatu tujuan. (Pahrudin, 2023).

Menurut William Dunn evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik berupa program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. (Nugroho, 2017).

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terendah yang berperan penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa tidak hanya dipandang sebagai satuan administratif, tetapi juga sebagai komunitas

sosial yang memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki otonomi asli dan menjadi ujung tombak pelayanan publik serta pembangunan nasional.

Pemerintahan desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan paling dasar yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal-usul, nilai adat, dan praktik lokal yang masih hidup, namun tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Nurchosin, 2016).

Pemerintahan desa dipahami sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya berdasarkan kewenangan desa. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sehingga pemerintahan desa tidak hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah di atasnya, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki otonomi dalam merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa. Sehingga pemerintahan desa merupakan sistem kepemimpinan lokal yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga desa. (Sovia, 2020).

Pandangan lain menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan kesatuan antara struktur kelembagaan formal dan pranata sosial yang berfungsi menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di tingkat desa. Struktur formal mencakup kepala desa beserta perangkatnya, lembaga kemasyarakatan, serta lembaga desa lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan ini, pemerintahan desa tidak hanya bertumpu pada mekanisme administratif yang bersifat formal, tetapi juga mengandalkan partisipasi dan kearifan lokal masyarakat desa. Keduanya berjalan saling melengkapi agar fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara efektif. (Wasistiono, 2019).

Lebih lanjut, pemerintahan desa dipandang sebagai sistem administrasi lokal yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan berdasarkan regulasi desa dan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah/pusat. Pemerintahan desa juga dipandang sebagai organisasi yang memiliki struktur, kewenangan, dan mekanisme kerja untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam pemahaman ini, desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi untuk merumuskan keputusan sesuai kebutuhan komunitasnya. Pemerintahan desa harus berjalan melalui tata kelola yang transparan, berpartisipasi, responsif, dan akuntabel agar mampu mewujudkan

pelayanan publik yang efektif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. (Tullah, 2022).

Sementara itu, pendapat lain menilai bahwa pemerintahan desa berperan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Desa menjadi wadah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah di atasnya. Hubungan sinergis antara pemerintah desa dan pemerintah daerah akan menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Rasyid, 2020).

Ahli lain juga memaknai pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan paling dasar yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan, pelayanan sosial, serta pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan desa dipahami sebagai unit yang memiliki otoritas asli berdasarkan tradisi lokal, sekaligus memperoleh kewenangan dari negara untuk mengelola urusan pemerintahan yang berskala desa. (Hakim, 2020).

Pandapat lain mengatakan pemerintahan desa adalah proses administratif dan politik di mana aparat desa bersama masyarakat merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan serta layanan publik di desa. Pemerintahan desa dipahami sebagai mekanisme penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan yang melibatkan partisipasi warga sebagai unsur utama. Pemerintahan desa bukan

hanya struktur birokrasi formal, tetapi juga sistem kerja kolektif yang mengutamakan dialog, kolaborasi, dan keterbukaan informasi agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa berfungsi sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta tercapainya pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. (Saragih, 2023).

Pemerintahan desa dianggap sebagai suatu sistem yang mengelola kepentingan publik di tingkat lokal melalui mekanisme musyawarah serta proses pengambilan keputusan yang berlandaskan kearifan lokal. Pemerintahan desa dipandang sebagai tatanan sosial administratif yang bekerja dengan mengintegrasikan norma adat, kebiasaan masyarakat, dan struktur kelembagaan formal untuk menyelesaikan persoalan publik di lingkungan desa. (Paulus, 2015).

Teori pemerintahan desa modern menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan prinsip tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Pemerintahan desa yang baik harus mampu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Desa yang kuat adalah desa yang mampu mengelola urusannya secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan peran aktif warga. Dengan demikian, partisipasi menjadi fondasi utama bagi pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan. (Eko, 2021).

Pandangan lain juga menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan cerminan penerapan prinsip good governance di tingkat lokal. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan desa yang baik. Pemerintahan desa tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan kepala desa, tetapi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat agar setiap kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintahan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat efektivitas pembangunan. (Syafri, 2020).

Pemerintahan desa merupakan tata kelola pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga. Penyelenggaraannya harus mengakomodasi partisipasi masyarakat, menjaga keterbukaan informasi, dan tanggap terhadap kebutuhan desa. Kepala desa dan perangkatnya memegang peranan sebagai penggerak pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. (Zulkarnain, 2018).

Seluruh pandangan di atas menunjukkan bahwa pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan paling dasar yang diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan, pelayanan sosial, serta pengelolaan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. teori pemerintahan desa tidak hanya berfokus pada aspek struktur pemerintahan, tetapi juga pada dimensi sosial, partisipatif, dan kultural. Pemerintahan desa yang ideal adalah pemerintahan yang mampu memadukan kearifan lokal dengan prinsip tata kelola modern, sehingga tercipta keseimbangan antara otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

2.1.7 Teori/Konsep Sistem Profil Desa dan Kelurahan

Pemerintah desa, yang dibentuk oleh kepala desa dan perangkat desa, ditugaskan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa harus memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa saat menjalankan fungsi dan tugasnya. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan suatu sistem informasi yang terintegrasi dan terorganisir yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang kondisi desa. Sistem tersebut dikenal dengan Prodeskel.

Gambar II.1 : Tampilan Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo



Sumber: Kantor Desa Kampung Baru Sentajo

Prodeskel merupakan sistem pendataan baku tentang kondisi objektif desa/kelurahan yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan desa. Prodeskel menjadi perangkat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menyediakan data dasar yang akurat, terstandar, dan dapat diperbandingkan antarwilayah. Melalui Prodeskel, pemerintah dapat memahami karakteristik desa berbasis bukti. Berikut uraian tiap item secara detail:

- 2.1.7.1** Data umum desa/kelurahan, kategori ini mencakup informasi dasar yang menggambarkan identitas administratif desa/kelurahan, meliputi identitas wilayah.
- 2.1.7.2** Data sosial, kategori ini menggambarkan kehidupan sosial masyarakat desa, meliputi pendidikan dan kesehatan
- 2.1.7.3** Data ekonomi, kategori ini menggambarkan kondisi ekonomi, mata pencaharian, dan potensi sumber daya lokal, meliputi lapangan pekerjaan, potensi ekonomi, infrastruktur ekonomi.
- 2.1.7.4** Data sarana prasarana, merupakan indikator penting pembangunan desa, meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, prasarana transportasi, prasarana air bersih dan energi, prasarana peribadatan.
- 2.1.7.5** Data lingkungan hidup, ini meliputi tutupan lahan, daerah rawan bencana, sumber daya air, kualitas lingkungan dan program pelestarian.
- 2.1.7.6** Data Pemerintahan dan Kelembagaan, data ini meliputi administrasi pemerintahan, kelembagaan desa, regulasi desa.
- 2.1.7.7** Data kemasyarakatan dan partisipasi publik, data ini meliputi partisipasi warga dalam musyawarah, kegiatan gotong royong, solidaritas sosia
- 2.1.7.8** Data Indeks Desa Membangun, untuk menentukan klasifikasi desa, data ini meliputi ketahanan sosial yang mengukur pendidikan, ketahanan ekonomi yang mengukur produksi ekonomi, ketahanan lingkungan yang mengukur kualitas lingkungan.

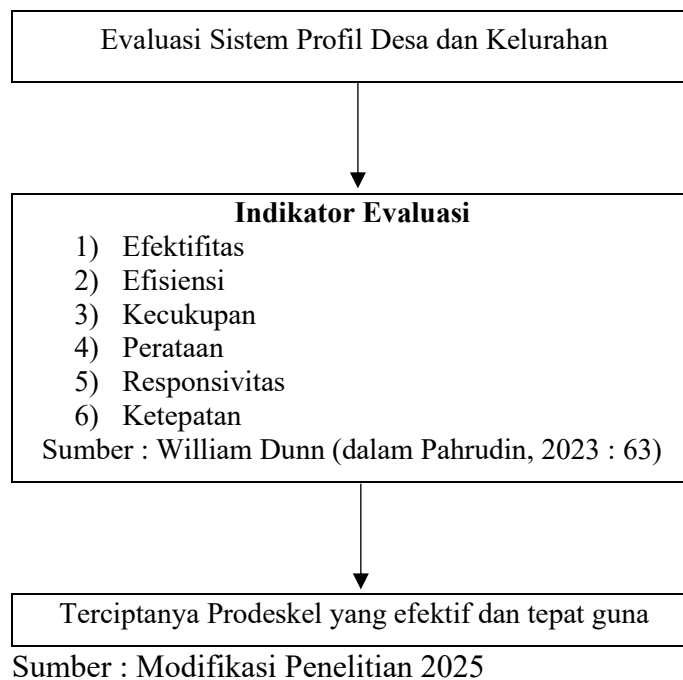
Item Prodeskel adalah komponen atau variabel yang menjadi objek pengumpulan data dalam penyusunan Prodeskel. Secara umum, struktur item Prodeskel mencakup data dasar keluarga, data Potensi Desa/Kelurahan, serta Indeks Desa/Kelurahan Membangun (IDM/IKM) yang memuat indikator perkembangan desa.

Guna utama dari Prodeskel itu adalah sebagai media komunikasi antara pusat dan daerah, alat pemantau potensi dan tingkat perkembangan, sebagai laboratorium pusat studi akademis tentang masalah sosial dan ekonomi desa dan kelurahan, dan sumber data bagi kementerian dan lembaga yang ingin merencanakan program pembangunan berbasis data desa dan kelurahan. Secara umum, proses penyusunan data Prodeskel meliputi persiapan instrumen pengumpulan data, pembentukan kelompok kerja untuk Prodeskel, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan publikasi data.

Selanjutnya, data Prodeskel digunakan sebagai data dasar bersama para pelaku pembangunan desa dan kelurahan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, perjalanan, dan penyelenggaraan proyek, sehingga data dasar desa menjadi lengkap, valid, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan adanya Prodeskel segala keputusan lebih terarah, tidak asal asalan, tidak mengikuti elite desa tapi benar benar sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi yang diandalkan desa. Prodeskel mendorong pemerintah bekerja lebih profesional karena sistem ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan peningkatan kinerja perangkat desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.2: Kerangka Pemikiran Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan awal atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban tersebut masih bersifat teoritis dan belum dibuktikan melalui data empiris di lapangan. Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dan akan diuji kebenarannya melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Berdasarkan landasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis bahwa **“Prodeskel di Kantor Pemerintah Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya belum dimanfaatkan secara optimal”**.

2.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, dengan indikator :

2.4.1 Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. (Pahrudin, 2023).

2.4.2 Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. (Pahrudin, 2023).

2.4.3 Kecukupan

Kecukupan berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. (Pahrudin, 2023).

2.4.4 Perataan

Perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang

berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubung dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber masyarakat. (Pahrudin, 2023).

2.4.5 Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. (Pahrudin, 2023).

2.4.6 Ketepatan

Ketepatan dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. (Pahrudin, 2023).

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Evaluasi Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Ukuran
Prodeskel	Evaluasi	1. Efektivitas	1. Tujuan	Kurang Baik
			2. Hasil	
		2. Efisiensi	1. Waktu	Sudah Baik
			2. Administrasi	
		3. Kecukupan	1. Kebutuhan	Cukup
			2. Standar	
		4. Perataan	1. Manfaat	Kurang Baik
			2. Akses	
		5. Responsivitas	1. Kepuasan	Cukup
			2. Kesesuaian	
		6. Ketepatan	1. Tepat Mutu	Cukup
			2. Tepat Guna	

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipahami sebagai proses ilmiah yang bertujuan memahami makna suatu fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman subjektif, interpretatif, dan kontekstual terhadap perilaku dan pandangan individu atau kelompok, bukan pada pengukuran angka, menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. (Gunawan, 2022).

3.2 Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah subjek yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai situasi, atau fenomena yang diteliti. Mereka dipilih karena mengetahui konteks secara mendalam dan mampu menjelaskan data yang tidak bisa diperoleh melalui dokumen atau observasi saja. (Sugiyono, 2020).

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah:

Tabel III.1 : Informan Penelitian Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

No	Informan	Jumlah orang	Persentase
1	Kepala Desa	1	12,5%
2	Sekretaris Desa	1	12,5%
3	Operator Prodeskel	1	12,5%
4	Kasi Kesejahteraan	1	12,5%
5	Ketua BPD	1	12,5%
6	Tokoh Masyarakat	3	37,5%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

Teknik penarikan informan dapat dilakukan melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam *purposive sampling*, peneliti menetapkan kriteria khusus berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan dalam *snowball sampling*, informan awal memberikan rekomendasi terhadap informan lain yang relevan, sehingga jumlah informan dapat berkembang secara bertahap sesuai kebutuhan data. (Sugiyono, 2016).

3.3 Sumber Data

Pada penelitian sumber data didefinisikan sebagai subjek darimana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan digolongkan menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder:

3.3.1 Data Primer

Data Primer, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, peneliti memperoleh data dari lapangan secara langsung, misalnya melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. (Wahyuningsih, 2023).

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah tersedia dan telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti dokumen, laporan, arsip, buku, jurnal, atau data instansi. Penggunaan data primer dan sekunder bertujuan untuk memperkuat validitas dan triangulasi data, serta memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam mengenai praktik evaluasi prodeskel. (Sujarweni, 2022).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menilai dan mengukur bagaimana pemanfaatan Prodeskel di kantor pemerintah desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan teori evaluasi William Dunn.

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kantor Pemerintah Desa, Jalan Lintas Teluk Kuantan - Rengat, Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan serangkaian teknik atau prosedur yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Metode ini mencakup berbagai cara seperti observasi, wawancara, angket, maupun dokumentasi, yang dipilih dan disesuaikan dengan tujuan serta karakteristik penelitian yang dilakukan. (Jufri, 2017).

Adapun metode pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi :

3.6.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang bersifat nyata dan faktual dari perilaku atau kejadian yang sedang berlangsung. (Sugiyono, 2020).

3.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan terarah antara peneliti dan informan untuk menggali makna, pengalaman, serta pemahaman mendalam terkait fenomena yang diteliti. Melalui interaksi langsung ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga interpretatif, karena wawancara memungkinkan peneliti menangkap perspektif subjektif informan, konteks sosialnya, dan alasan yang melatarbelakangi sikap atau tindakan mereka. (Moleong, 2019).

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis. (Gunawan, 2022).

3.6.4 Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. (Sugiyono, 2024).

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian, bukan hanya setelah data terkumpul. Teori

menyebutkan tiga komponen utama yang saling berhubungan dan berlangsung secara simultan, Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut: (Sugiyono, 2016).

3.7.1 *Data Reduction* (Reduksi data)

Kondensasi data merupakan proses penyederhanaan data merupakan bagian dari analisis yang bertujuan mengorganisasi data secara sistematis sehingga mampu mengungkapkan tema dan pola tertentu. Penyajian dan pemilihan data yang esensial membantu peneliti menjangkau makna mendalam dari pengalaman subjek, sehingga proses kondensasi menjadi inti dari pembuatan struktur analitis dalam penelitian kualitatif. (Moleong, 2017).

3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses mengelompokkan dan merangkum data hasil wawancara, observasi, ataupun dokumen ke dalam bentuk deskripsi yang jelas. Penyajian data menurutnya bertujuan untuk memperlihatkan alur logis temuan sehingga memudahkan peneliti dalam melanjutkan analisis. Penyajian yang baik harus mampu mempertahankan makna autentik informan sekaligus menampilkan struktur tematik yang dapat dipahami pembaca. (Herdiansyah, 2019).

3.7.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Conclusion drawing adalah hasil penafsiran peneliti terhadap makna yang tersembunyi di balik tindakan, ucapan, dan pengalaman informan. Penarikan kesimpulan harus mencerminkan keterpaduan antara data empiris, konteks sosial, dan kerangka teori yang digunakan. Kesimpulan juga harus ditarik melalui proses

refleksi mendalam sehingga menghasilkan pemahaman yang autentik terhadap fenomena yang diteliti. (Moleong, 2017).

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal		X																						
2	Pembuatan Proposal					X	X	X																	
3	Bimbingan Proposal											X	X	X											
4	Seminar Proposal													X											
5	Revisi Proposal														X										
6	Pembuatan Skripsi																	X	X	X					
7	Bimbingan Skripsi																				X	X			
8	Sidang Skripsi																							X	
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan singingi merupakan salah satu dari sepuluh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Terletak di jalur tengah lintas Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Jambi di bagian Selatan, Provinsi Sumatera Barat di bagian Barat, dan Provinsi Indragiri Hulu di bagian Timur, sementara batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi di Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

Kabupaten Kuantan Singingi berada antara 0°00' 1°00' Lintang Selatan dan 101°02' 101°55' Bujur Timur. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas sekitar 7.656,03 km² dengan ketinggian bervariasi antara 25-30 meter.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman. Kabupaten Kuantan Singingi juga terdiri dari 11 kelurahan dan 218 desa desa, salah satunya adalah Desa Kampung Baru Sentajo.

4.1.2 Letak Geografis Desa Kampung Baru Sentajo

Desa Kampung Baru Sentajo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sentajo Raya seluas 5,07 km². Secara geografis, Desa Kampung Baru

memiliki posisi strategis yang berada di jalur lintas Teluk Kuantan -Rengat. Desa Kampung Baru Sentajo berbatasan dengan Kecamatan Benai di bagian Utara, berbatasan dengan Benai Kecil di bagian Selatan, berbatasan dengan desa Koto Sentajo di bagian Barat, dan berbatasan dengan Kecamatan Benai di bagian Timur.

Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

4.1.2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa itu sendiri. Visi desa Kampung Baru Sentajo ini dibuat dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan semua orang di desa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Masyarakat, dan masyarakat umum. Berdasarkan musyawarah tersebut maka visi desa Kampung Baru Sentajo adalah:

"DESA YANG MANDIRI BERBASIS PERTANIAN"

4.1.2.2 Misi

Misi merupakan pernyataan-pernyataan apa yang harus dilakukan oleh desa untuk mencapai tujuan tersebut. Visi berada di atas misi, yang kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dilaksanakan atau dicapai.

Adapun misinya adalah sebagai berikut:

4.1.2.2.1 Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa

4.1.2.2.2 Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.

4.1.2.3 Penduduk

Desa Kampung Baru Sentajo memiliki Desa Kampung Baru Sentajo memiliki total penduduk 2.564 orang, dengan 1.307 laki-laki dan 1.257 perempuan. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Sentajo

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.307	55%
2	Perempuan	1.257	45%
Jumlah		2.564	100%

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru Sentajo 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah penduduk desa Kampung Baru Sentajo lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Total laki-laki 1.307 orang dengan persentase 55%, sedangkan total perempuan 1.257 orang dengan persentase 45%.

4.1.2.4 Fasilitas Umum

Fasilitas umum diartikan sebagai sarana prasarana yang membantu aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat, seperti jalan desa, balai desa, puskesmas/posyandu, tempat ibadah, pasar desa, sekolah, makam. Tujuan fasilitas ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, dan kualitas hidup. Adapun fasilitas umum Desa Kampung Baru Sentajo adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 : Sarana Pendidikan Umum Desa Kampung Baru Sentajo

No	Satuan	Jumlah
1	Paud/Play Group	1
2	Taman Kanak-Kanak	1
3	SD/MI	1
4	SMP/MTS	1
5	SMA/MA Sederajat	0
Total		4

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru Sentajo 2026

Tabel IV.3 : Sarana Olahraga Desa Kampung Baru Sentajo

No	Sarana	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Volly	4
3	Lapangan Takraw	1
4	Lapangan Badminton	1
Total		7

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru Sentajo 2026

Tabel IV.4: Sarana Pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo

No	Sarana	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Gedung Serbaguna	1
3	BUMDES	1
4	Koperasi	1
5	Pelayanan Pertanian	1
Total		5

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru Sentajo 2026

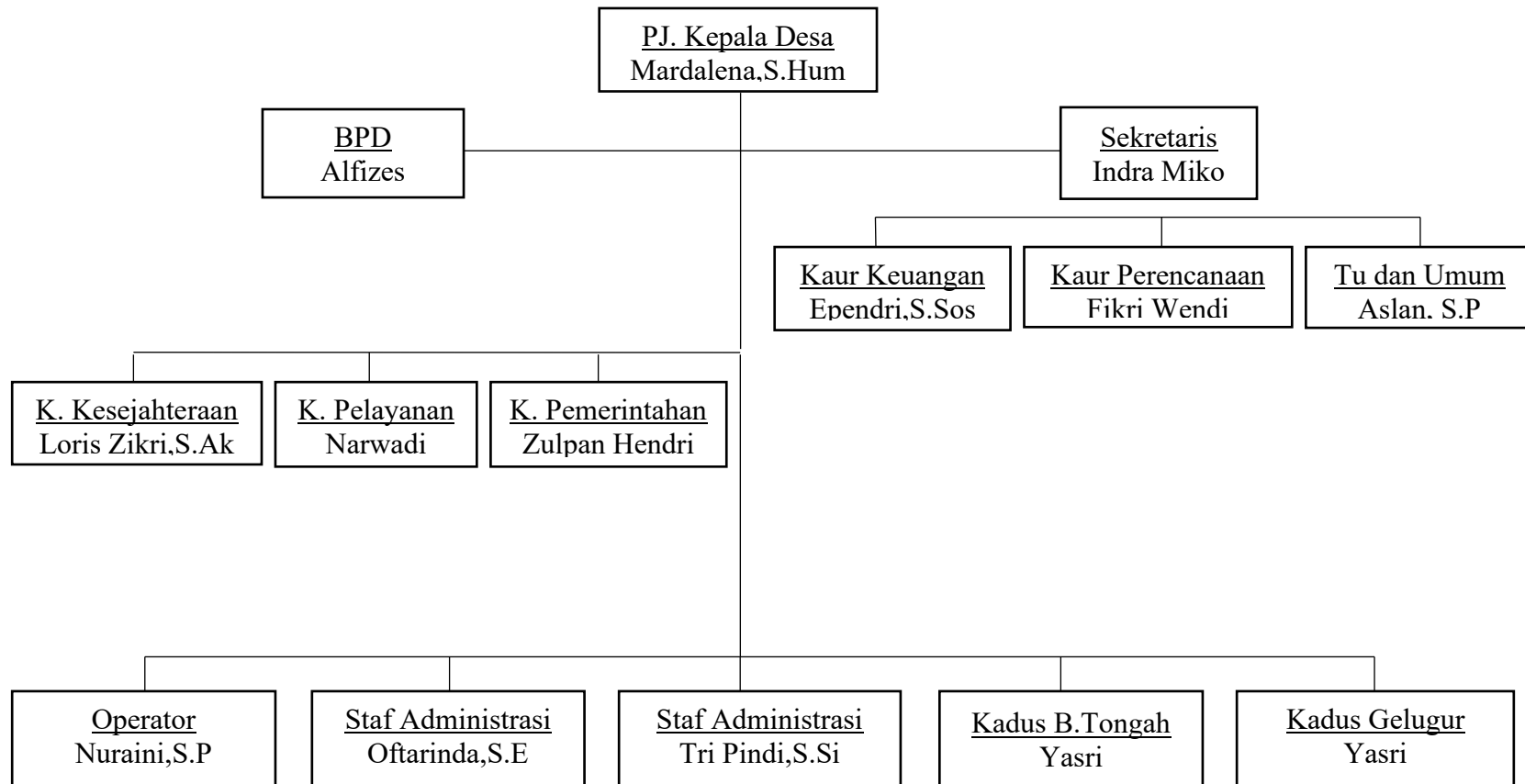
Tabel IV.5: Sarana Tempat Ibadah Desa Kampung Baru Sentajo

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah	4
Total		6

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru Sentajo 2026

4.2 Struktur Organisasi Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya



4.3 Tugas dan Fungsi

4.3.1 Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, hak, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

4.3.1.1 Hak Kepala Desa

4.3.1.1.1 Mengusulkan struktur dan operasi pemerintah desa.

4.3.1.1.2 Mengusulkan dan menetapkan peraturan Desa.

4.3.1.1.3 Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

4.3.1.1.4 Memberikan mandat kepada perangkat desa atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

4.3.1.2 Kewajiban Kepala Desa

4.3.1.2.1 Memelihara dan melaksanakan Pancasila, menerapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

4.3.1.2.2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.1.2.3 Menjaga masyarakat desa agar tetap tenang dan tertib.

4.3.2 Sekretaris Desa

4.3.2.1 Tugas dan Fungsi

- 4.3.2.1.1 Memberikan dukungan administrasi kepada kepala desa dan seluruh perangkat pemerintahan desa dan masyarakat.
- 4.3.2.1.2 Mewakili kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
- 4.3.2.1.3 Mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat.
- 4.3.2.1.4 Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 4.3.2.1.5 Menyusun program kerja tahunan desa dan pertanggung jawaban.
- 4.3.2.1.6 Membantu dalam penyusunan laporan pemerintah desa dan menyampaikan bahan rancangan peraturan desa untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

4.3.3 Operator Prodeskel

Operator Prodeskel adalah aparatur desa yang bertanggung jawab dalam mengelola, menginput, memperbarui, dan melaporkan data profil desa dan kelurahan melalui Prodeskel. Prodeskel digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.

4.3.3.1 Tugas Operator

- 4.3.3.1.1 Mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan keadaan nyata desa.
- 4.3.3.1.2 Memasukkan data ke dalam sistem Prodeskel dengan format yang ditetapkan.
- 4.3.3.1.3 Memperbarui data secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi desa.
- 4.3.3.1.4 Membuat laporan tentang hasil pengelolaan data profil desa. Selanjutnya disampaikan kepada kepala desa dan pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten.

4.3.3.2 Fungsi Operator

- 4.3.3.2.1 Verifikasi dan validasi data sebelum disimpan dalam sistem untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan benar, akurat, tidak ganda, dan sesuai dengan keadaan nyata desa.
- 4.3.3.2.2 Sebagai pengelola administrasi data desa, operator bertanggung jawab untuk menginput, menyimpan, dan mengelola data dalam fungsi ini.
- 4.3.3.2.3 Sebagai penyedia informasi pembangunan desa. Prodeskel membantu pemerintah desa menentukan prioritas kebijakan dan pembangunan.

4.3.4 Kasi Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan merupakan perangkat desa yang berperan penting dalam membantu Kepala Desa melakukan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti menerapkan program pembangunan.

4.3.4.1 Tugas Kasi Kesejahteraan

- 4.3.4.1.1 Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi program pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
- 4.3.4.1.2 Mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersifat sosial kemasyarakatan.
- 4.3.4.1.3 Mendata kelompok yang membutuhkan bantuan, seperti masyarakat kurang mampu, anak yatim, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

4.3.4.2 Fungsi Kasi Kesejahteraan

- 4.3.4.2.1 Menjadi pelaksana kebijakan pemerintah desa di bidang kesejahteraan masyarakat.
- 4.3.4.2.2 Sebagai pendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.
- 4.3.4.2.3 Sebagai jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam bidang sosial dan kesejahteraan.

4.3.5 Badan Permusyawaratan Desa

Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab untuk memimpin rapat, menyusun rencana kerja, dan menjalankan pengawasan kinerja Kepala Desa. Mereka juga berfungsi sebagai mitra strategis Kepala Desa untuk menyepakati peraturan desa dan menjaga stabilitas pemerintahan desa. Mereka juga berfungsi sebagai koordinator dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama mengawasi kinerja pemerintahan desa, membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan memimpin lembaga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketua juga berperan penting dalam memimpin musyawarah dan memastikan bahwa kepentingan desa dan desa seimbang.

BAB VI

PENUTUP

4.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data pembahasan peneliti serta penjabaran dari masing-masing dimensi teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat pada tujuan dan hasilnya yang belum tercapai maksimal. Kemudian perataan manfaat Prodeskel dan perataan akses belum sepenuhnya merata di seluruh elemen masyarakat maupun perangkat desa.

4.5 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- 6.2.1 Perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, terutama operator Prodeskel itu sendiri agar memahami pembaruan, dan validasi data secara berkelanjutan.
- 6.2.2 Perlunya meningkatkan standar operasional prosedur dalam pengelolaan Prodeskel supaya proses penginputan dan pembaruan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.
- 6.2.3 Perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkuat transparansi, sehingga manfaat dan akses Prodeskel lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdullah. (2019). *Evaluasi Kebijakan Publik: Pendekatan Praktis dan Teoritis*.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Rajawali Pers.
- Divayana, D. G. H. (2018). *Evaluasi Program: Konsep Dasar dan Pengimplementasiannya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th (ed.)). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Partisipatif*. Fisipol Press.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Bumi Aksara.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Hakim, L. (2020). *Pengelolaan Pemerintahan Desa dalam Era Otonomi Daerah*. Fokusmedia.
- Hariawan, B. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa*. Deepublish.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer (Edisi ke-2)*. Salemba Humanika.
- Hermansyah. (2017). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Pustaka Setia.
- Indriyani, E. (2016). *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Pemerintah/Pemda*. IPDN Press.
- Irawan, A. (2020). *Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Ekonomi Lokal*. Kencana.
- Jufri, H. (2017). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Kacaribu, M. (2020). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Perdana Publishing.
- Kadji, Y. (2016). *Evaluasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. UNG Press.
- Kasaefulloh, A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktik*. Alfabeta.
- Kencana, I. (2022). *Etika Administrasi Negara*. Bumi Aksara.
- Komariah, A. (2018). *Governance Desa Partisipatif*. Deepublish.
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*.

UPP STIM YKPN.

- Kurniawan, T. (2017). *Artikel dan Buku di Bidang Governance dan Kebijakan Publik*.
- Mardiasmo, D. (2016). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (E. Revisi (ed.)). Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Natalia, A. (2022). Paradigma Good Governance dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP). *Jurnal TAPIs: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 15–26..
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Analisis, Proses Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nurchosin, H. (2016). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar.
- Nurkholis. (2020). *Pembangunan Daerah Berbasis Pemberdayaan dan Tata Kelola*. Rajawali Pers.
- Nursinta, E. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Administrasi Desa*. Desa Pustaka Indonesia.
- Pahrudin. (2023). *Anatomi Kebijakan Publik*. Prenada Media.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Paulus, Y. (2015). *Pemerintahan Desa dan Kearifan Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (2017). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Alfabeta.
- Rakhmat, P. D. D. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. ANDI Publisher.
- Rasyid, R. (2020). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Grasindo.
- Revida, E. (2020). *Administrasi Publik: Konsep Dasar dan Perkembangannya*. Perdana Publishing.
- Saepudin, D. (2015). *Evaluasi Program dan Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Said, M. (2016). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*. UMM Press.
- Saragih, J. (2023). Peningkatan kapasitas aparatur desa... *Ejournal STEI Tholabul 'Ilmi*.
- Sedarmayanti. (2019). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama.
- Setiawan, B. (2023). *Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan di Era Desentralisasi*. Pustaka Nusantara.

- Sovia, H. (2020). *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Sriyani. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Prenadamedia Group.
- Sudjana, N. (2017). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Cetakan ke-21)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian NOTE-1 - ed. terbaru (dirujuk melalui repository dan dokumen akademik)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-30)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sumaryana, A. (2018). *Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Lokal*. Pustaka Setia.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *SAFa: Jurnal Inovasi Ilmiah / Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan*.
- Suryana, A., & Harahap, I. (2020). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sutaryo, M. (2019). *Kebijakan Publik: Teori dan Implementasi di Indonesia*.
- Syafiie, I. K. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Syafri, W. (2020). *Ilmu Pemerintahan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Cetakan ke-3)*. CV Alfabeta.
- Tangkilisan, H. (2020). *Ilmu Administrasi Negara*. Gava Media.
- Tjandra, W. R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Tjokroamidjojo, B. (2017). *Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. LP3ES.
- Tullah, Y. R. R. (2022). *Pemerintahan desa (bab/skripsi)*. PKN STAN Repository / Eprints.
- Wahab, S. A. (2022). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wahyuningsih, S. (2023). *Metode Penelitian*. Repository STEI.

- Wasistiono, S. (2019). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Fokusmedia.
- Wirawan. (2016). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Yunus, M., & Rahman, F. (2019). *Leadership dalam Pembangunan dan Administrasi Publik*. Rajawali Pers.
- Zauhar, S. (2015). *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi* (4 ed.). Bumi Aksara.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2019). *Ilmu Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Zuleha, S. (2020). *Kebijakan Publik: Konsep, Proses, dan Implementasi*. Prenadamedia Group.
- Zulkarnain, M. (2018). *Pemerintahan dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Prodeskel.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara Penelitian

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

**Judul : Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) di Kantor
Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo
Raya**

**Kepada : Unsur Pemerintahan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

A. Identitas Peneliti

Nama : Nurlisai Yulanda
NPM : 220411063
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pertanyaan wawancara untuk unsur Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Penerapan Indikator Efektivitas Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Apakah hasil Prodeskel memberikan dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

B. Penerapan Indikator Efisiensi Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah Prodeskel membantu mempercepat proses pengelolaan data di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Apakah Prodeskel mengurangi pekerjaan administrasi manual di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

C. Penerapan Indikator Kecukupan Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah Prodeskel mampu memenuhi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Apakah Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo telah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

D. Penerapan Indikator Perataan Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah manfaat Prodeskel telah dirasakan secara merata oleh seluruh unsur pemerintah desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Apakah seluruh unsur pemerintah desa memiliki akses yang sama terhadap Prodeskel?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

E. Penerapan Indikator Responsivitas Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah Prodeskel mampu memberikan rasa puas terhadap informasi profil desa yang lebih terstruktur?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Apakah Prodeskel mampu menyesuaikan diri dengan kemampuan teknis perangkat ataupun kebutuhan informasi desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

F. Penerapan Indikator Ketepatan di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah informasi dalam Prodeskel dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan di Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Apakah Prodeskel berguna langsung dalam memberikan kemudahan penyusunan perencanaan pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya

Kepada : Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : Nurlisai Yulanda
 NPM : 220411063
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Penerapan Indikator Efektivitas Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana pemahaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai tujuan Prodeskel di Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa menilai dampak hasil Prodeskel terhadap kualitas perencanaan pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

B. Penerapan Indikator Efisiensi Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana perbandingan waktu yang dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh informasi desa sebelum dan sesudah adanya sistem tersebut?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

C. Penerapan Indikator Kecukupan Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana penilaian Badan Permusyawaratan Desa terhadap kecukupan kebutuhan informasi dalam Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana penilaian Badan Permusyawaratan Desa terhadap kesesuaian Prodeskel dengan standar yang mengaturnya?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

D. Penerapan Indikator Perataan Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana perataan manfaat Prodeskel dalam mendukung fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana tingkat kemudahan akses Badan Permusyawaratan Desa terhadap data dan informasi dalam sistem Prodeskel?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

E. Penerapan Indikator Responsivitas Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana tingkat kepuasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penerapan Prodeskel untuk data yang lebih terstruktur?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana kesesuaian Prodeskel dengan kebutuhan informasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi?

Berikan Ulasan

.....

F. Penerapan Indikator Ketepatan di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa menilai mutu data Prodeskel dalam menggambarkan kondisi desa?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa menilai guna Prodeskel dalam mendukung fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa?

Berikan Ulasan

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya

Kepada : Unsur Tokoh Masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : Nurlisai Yulanda
 NPM : 220411063
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur tokoh masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Penerapan Indikator Efektivitas Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap tujuan Prodeskel di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap dampak hasil Prodeskel yang diperoleh saat ini?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

B. Penerapan Indikator Efisiensi Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana perbandingan waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh informasi desa sebelum dan sesudah adanya sistem tersebut?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

C. Penerapan Indikator Kecukupan Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana Prodeskel mampu memenuhi antara kebutuhan informasi masyarakat dengan data yang tersedia dalam Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap Prodeskel dan standar yang mengaturnya?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

D. Penerapan Indikator Perataan Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana tingkat perataan manfaat Prodeskel dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang tersedia dalam Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo?

Berikan Ulasan

.....

.....

E. Penerapan Indikator Responsivitas Prodeskel di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prodeskel untuk data yang lebih terstruktur?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana kesesuaian Prodeskel dengan kebutuhan informasi masyarakat saat ini?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

F. Penerapan Indikator Ketepatan di Kantor Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana masyarakat menilai mutu data Prodeskel dalam menggambarkan desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Bagaimana masyarakat menilai guna Prodeskel untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial atau musyawarah desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

.....

2. Dokumentasi Penelitian Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Sistem Profil Desa Dan Kelurahan (Prodeskel) Di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya



Gambar I : Wawancara dengan Pj. Kepala Desa Kampung Bau Sentajo yaitu Ibu Mardalena,S.Hum



Gambar II : Wawancara dengan Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo yaitu Bapak Indra Miko



Gambar III : Wawancara dengan Operator Prodeskel Desa Kampung Baru Sentajo yaitu Ibu Nuraini, S.P



Gambar IV : Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Kampung Baru Sentajo yaitu Bapak Loriz Zikri, S.Ak



Gambar V :Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Alfizes



Gambar VI: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Adat) Desa Kampung Baru Sentajo yaitu Bapak Yasri



Gambar VII : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Agama) Desa Kampung Baru Sentajo yaitu Ibu Jusmainar



Gambar VIII : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Akademisi) Desa Kampung Baru Sentajo yaitu Ibu Masnawati

3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 012/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
 - a. Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nurlisai Yulanda
 NPM : 220411063
 Judul Skripsi : Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEK) di Kantor Pemerintahan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

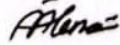
DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025



Penyusunan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa

4. Surat Balasan Riset Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KECAMATAN SENTAJO RAYA KEPALA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO Jalan Datuk Marajo No. 22 Kampung Baru Sentajo Telp.0853 0760 0192 KAMPUNG BARU SENTAJO Kode Pos.29562
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : 120 / SKet-KBS / III / 2026	
Kepala Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:	
Nama	: NURLISAI YULANDA
NIM	: 220411063
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	: S1
Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul: "EVALUASI SISTEM PROFIL DESA DAN KELURAHAN DI KANTOR PEMERINTAH DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA"	
Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.	
DIKELUARKAN DI : KP. BARU SENTAJO PADA TANGGAL : 01 April 2026 Pj.KEPALA DESA  MARDALENA, S. Hum NIP. 19760612 200701 2 009	

5. Catatan Bimbingan Proposal



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : NURLISAI YULANDA

NPM : 220411063

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. RIKA RAMADHANTI, S.Ip.,M.Si

2. ALSAR ANDRI, S.Sos.,M.Si

JUDUL : EVALUASI SISTEM PROFIL DESA DAN
KELURAHAN (PRODESKEL) DI KANTOR
PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG BARU
SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	6/11 2025	Perbaiki Cover Perbaiki Kata Pengantar		Ans	
		Perbaiki Daftar Isi, Daftar tabel, Daftar Gambar		Ans	
2.	7/11 2025	Tambahkan teori kebanyakan		Ans	
		Perbaiki sitasi		Ans	

3.	10/11 2025	Tambahkan Pengertian Primer/ Sekunder		Ang	
		Bahasa Asing Cetak miring		Ang	
4.	10/11 2025	Perbaiki Informan		Ang	
		Perbaiki Kerangka pemikiran		Ang	
		Tambahkan teori Gabungan		Ang	
5.	21/11 2025	Acc		Ang	
6	24/11-2025	modul koreksi - Rapikan penulisan	Rk.		
		Latar belakang Dasar konsep teori			
		di tambahkan Gaya penulisan ?			

7 1/Des-25 - Tambahkan Teori Rk
- Metode peneliti

8 2/Des-25 - link pendukung masuk sumber.
- kuesioner -
- referensi di update Rk

9. Acc Rk

6. Catatan Bimbingan Skripsi



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NURLISAI YULANDA

NPM : 220411063

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. RIKA RAMADHANTI, S.Ip., M.Si

2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

JUDUL : EVALUASI SISTEM PROFIL DESA DAN KELURAHAN
 (PRODESKEL) DI KANTOR PEMERINTAH DESA
 KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMTAN SENTAJO RAYA

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	02/04/20	Sesuaikan Indikator Penelitian Defter w-w-nccn 6-gi Menjadi 3 unsur			
2.	07/04/20	Acc defter w-w-nccn			

3	23/09	26	Perbaiki penulisan hasil wawancara	Aug	
4	27/09	26	Perbaiki analisis penelitian per indikator pembahasan lebih diperjelas	Aug	
5	30/09	26	Acc	Aug	
1.	05/05	- 26	Perbaiki bab V (Tipe Analisis)	Rk	
2.	11/05	- 26	Bab V Perbaiki analisis per indikator.	Rk.	
3	21/05	- 26	lengkapi analisis bag teori yg relevan	Rk.	

4 3/06 - Apakah secara keseluruhan Rk

7. Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas Jaka Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Nurlisai Yulanda

NPM : 220411063

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Evaluasi Sistem Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) di Kantor
 Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

Hari/Tgl Ujian : Rabu / 24 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

8. Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi Penelitian

Form 11



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp. 0760-561655 Fax 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Nurlisai Yulanda**
 NPM : 220411063
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Evaluasi Sistem Profil Desa Dan Kelurahan (Prodeskel) di Kantor Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.
 Hari/Tgl Ujian : Kamis / 09 Juli 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2. 
3.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Pembimbing 1	3. 
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota 1	4. 
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota 2	5. 

Catatan:
 Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

9. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nurlisai Yulanda
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru Sentajo, 07 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Gelugur RT 07 RW 04 Desa Kampung Baru
Sentajo Kecamatan Sentajo Raya
Alamat Email : nurlisaiyulanda@gmail.com
Pendidikan : 1. Tahun 2016 LULUS SDN 001 Kampung Baru Sentajo
2. Tahun 2019 LULUS MTSN 2 Kuantan Singingi
3. Tahun 2022 LULUS SMAN 1 Sentajo Raya

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 27 April 2026

Penulis

NURLISAI YULANDA
NPM.220411061